

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Sari (2012) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Terpaan Berita Korupsi di Media Televisi terhadap Persepsi Staff dan Karyawan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Yogyakarta tentang Pejabat Negara (Studi Kuantitatif Pengaruh Terpaan Berita Korupsi Angelina Sondakh dalam Kasus Wisma Atlet di TV One dan Metro TV Terhadap Persepsi Staff dan Karyawan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Yogyakarta tentang Pejabat Negara Bergender Perempuan)”. Peneliti tertarik untuk mengetahui apakah ada pengaruh terpaan berita kasus ini terhadap persepsi responden. Teori Efek Terbatas digunakan peneliti sebagai teori utama dalam penelitian ini. Teori efek terbatas adalah teori yang menyatakan bahwa media memiliki efek yang minim atau terbatas karena efek tersebut dikurangi oleh beragam variabel antara. Terdapat tiga variabel dalam penelitian ini yaitu variabel X (terpaan berita), variabel Y (persepsi) dan variabel kontrol Z (faktor individu dan faktor sosial). Alat pengukuran data dengan kuesioner yang dibagikan kepada responden. Kuesioner sebanyak 50 dibagikan secara acak kepada staff dan karyawan BPPM. Analisis data menggunakan uji validitas dan reliabilitas kemudian data dikorelasikan dengan korelasi Pearson dan korelasi parsial untuk mengetahui hubungan variabel. Lalu penulis menggunakan regresi dan selanjutnya untuk mengetahui hipotesis diterima atau ditolak, penulis menganalisis dengan

menggunakan uji-t. Hasil penelitian yang dilakukan di BPPM Daerah Istimewa Yogyakarta, menunjukkan hasil bahwa terdapat pengaruh terpaan berita terhadap persepsi responden dalam hal ini staff dan karyawan BPPM DIY. Dengan hasil ini dapat diketahui bahwa dalam penelitian ini hipotesis diterima. Jika dikaitkan pada teori efek terbatas hal ini dinyatakan benar karena terpaan berita hanya sedikit mempengaruhi persepsi dan persepsi dipengaruhi oleh faktor lain di luar terpaan berita. Dari hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa semakin meningkat terpaan berita korupsi maka akan meningkatkan persepsi staff dan karyawan BPPM mengenai pejabat negara bergender perempuan.

Lukitasari (2014) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pemberitaan Di Televisi Terhadap Citra Partai Politik (Studi Deskriptif Kuantitatif Pengaruh Terpaan Pemberitaan Tentang Korupsi PKS di Televisi Tahun 2013 Terhadap Citra PKS di Kalangan Mahasiswa FKI Jurusan Ilmu Komunikasi Angkatan 2011 Universitas Muhammadiyah Surakarta)”. Terpaan pemberitaan yang terus menerus dilakukan membuat masyarakat mengkaji dan mendefinisikan sendiri berita tersebut. Hal inilah yang akan mempengaruhi persepsi sehingga menimbulkan keraguan di masyarakat akan kredibilitas PKS. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif. Pengelolaan data penelitian menggunakan metode analisis data statistik inferensial yaitu digunakan dalam penelitian eksplanatif, dimana penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara dua variabel atau lebih. Dalam penelitian ini yang menjadi sampel adalah mahasiswa FKI Jurusan Ilmu Komunikasi UMS Angkatan 2011 yang masih aktif kuliah sebanyak 91 responden. Dalam

menganalisa menggunakan alat analisis regresi dan koefisien korelasi. Hasil penelitian menunjukkan nilai koefisien sebesar 0,306 dengan *p-value* sebesar 0,013 sehingga hipotesis diterima, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara terpaan pemberitaan tentang korupsi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di televisi terhadap citra Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di kalangan mahasiswa FKI Jurusan Ilmu Komunikasi Angkatan 2011.

Rohmah (2015) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pemberitaan Penangkapan Bambang Widjojanto di Metro TV Terhadap Persepsi Mahasiswa Tentang Citra KPK (Survei Terhadap Mahasiswa Aktivis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)”. Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui apakah ada pengaruh pemberitaan tersebut terhadap persepsi mahasiswa aktivis tentang citra KPK setelah munculnya pemberitaan tersebut melalui angket atau kuesioner dengan 88 responden. Responden yang dipilih adalah mahasiswa Aktivis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang bernaung dibawah organisasi Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan metode survei dan kuesioner sebagai alat pengumpulan data. Pengambilan sampel dilakukan dengan *purposive*. Data hasil kuesioner kemudian diolah menggunakan statistik regresi linear berganda untuk mencari pengaruh pemberitaan tersebut terhadap citra KPK. Untuk mengidentifikasi hal tersebut, peneliti menggunakan konsep Stephen W. Littlejohn yaitu *individual issue salience, familiarity, favorability, support, likelihood of action* dan *freedom of action*. Penelitian ini menggunakan teori Agenda Setting yang mengasumsikan bahwa apa yang dianggap penting oleh media maka dianggap penting oleh publik.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh adanya pengaruh persepsi mahasiswa tentang citra KPK terhadap pemberitaan penangkapan Bambang Widjojanto di Metro TV.

2.2 Komunikasi Politik

2.2.1 Pengertian Komunikasi Politik

Komunikasi politik merupakan proses yang berkesinambungan, dan melibatkan pertukaran informasi di antara individu-individu yang satu dengan kelompok-kelompoknya pada semua tingkat masyarakat. Komunikasi politik merupakan proses dimana informasi politik yang relevan diteruskan dari satu bagian sistem politik kepada bagian lainnya dan di antara sistem-sistem sosial dengan sistem-sistem politik (Rush dan Althoff, 2008:24).

Sementara itu, Karl W. Deutsch mendefinisikan komunikasi politik sebagai transmisi informasi yang relevan secara politis dari satu bagian sistem politik kepada sistem politik yang lain, dan antara sistem sosial dan sistem politik yang merupakan unsur dinamis dari suatu sistem politik, sehingga hasil yang dicapai dapat mempengaruhi pembahasan suatu kebijaksanaan yang ditujukan untuk kepentingan umum (Rush dan Althoff, 2008:253). Denton dan Woodward mengartikan komunikasi politik sebagai diskusi publik tentang alokasi sumber kekuasaan, kewenangan pemerintah baik eksekutif maupun legislatif, dan pemberian sanksi berupa mekanisme *reward and punishment* (Mardana, 2010).

Komunikasi politik adalah suatu proses pengoperan lambang-lambang atau simbol-simbol komunikasi yang berisi pesan-pesan politik dari seseorang atau kelompok kepada orang lain dengan tujuan untuk membuka wawasan atau cara berpikir, serta mempengaruhi sikap dan tingkah laku khalayak yang menjadi target politik (Cangara, 2009:35).

Berdasarkan berbagai pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa komunikasi politik adalah suatu proses penyampaian dan penyebaran berbagai pesan dan perilaku politik yang dilakukan oleh komunikator kepada khalayak luas.

2.2.2 Fungsi Komunikasi Politik

Komunikasi politik memiliki fungsi-fungsi tertentu dalam setiap sistem sosial. Menurut Widjaja (2010:9-10) bahwa fungsi komunikasi politik dalam setiap sistem sosial mencakup beberapa hal sebagai berikut:

- a. Informasi: pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan, penyebaran berita, data, gambar, fakta dan pesan opini dan komentar yang dibutuhkan agar dapat dimengerti dan bereaksi secara jelas terhadap kondisi lingkungan dan orang lain agar dapat mengambil keputusan yang tepat.
- b. Sosialisasi (pemasyarakatan): penyediaan sumber ilmu pengetahuan yang memungkinkan orang bersikap dan bertindak sebagai anggota masyarakat yang efektif sehingga ia sadar akan fungsi sosialnya sehingga ia dapat aktif di dalam masyarakat.
- c. Motivasi: menjelaskan tujuan setiap masyarakat jangka pendek maupun jangka panjang, mendorong orang menentukan pilihannya dan

keinginannya, mendorong kegiatan individu dan kelompok berdasarkan tujuan bersama yang akan dikejar.

- d. Perdebatan dan diskusi: menyediakan dan saling menukar fakta yang diperlukan untuk memungkinkan persetujuan atau menyelesaikan perbedaan pendapat mengenai masalah publik.

Adapun menurut Mc.Nair dan Hedebo dalam Cangara (2009:40-41) bahwa fungsi komunikasi politik meliputi:

- a. Memberikan informasi kepada masyarakat terhadap usaha-usaha yang dilakukan lembaga politik maupun dalam hubungannya dengan pemerintah dan masyarakat.
- b. Melakukan sosialisasi tentang kebijakan, program, dan tujuan lembaga politik.
- c. Memberi motivasi kepada politisi, fungsionaris, dan para pendukung partai.
- d. Menjadi platform yang bisa menampung ide-ide masyarakat, sehingga menjadi bahan pembicaraan dalam bentuk opini publik.
- e. Mendidik masyarakat dengan pemberian informasi, sosialisasi tentang cara-cara pemilihan umum dan penggunaan hak mereka sebagai pemberi suara.
- f. Menjadi hiburan masyarakat sebagai “pesta demokrasi” dengan menampilkan para juru kampanye, artis, dan para komentator atau pengamat politik.

- g. Memupuk integrasi dengan mempertinggi rasa kebangsaan guna menghindari konflik dan ancaman berupa tindakan separatis yang mengancam persatuan nasional.
- h. Menciptakan iklim perubahan dengan mengubah struktur kekuasaan melalui informasi untuk mencari dukungan masyarakat luas terhadap gerakan reformasi dan demokratisasi.
- i. Meningkatkan aktivitas politik masyarakat melalui siaran berita, *agenda setting*, maupun komentar-komentar politik.
- j. Menjadi *watchdog* atau anjing penjaga dalam membantu terciptanya *good governance* yang transparansi dan akuntabilitas.

2.2.3 Bentuk Komunikasi Politik

Menurut Nurprojo (2010:52) bahwa terdapat beberapa bentuk komunikasi politik yang biasa digunakan oleh politikus atau aktivis politik untuk mencapai tujuannya, di antaranya adalah; retorika politik, agitasi politik, propaganda politik, *public relations*, kampanye politik, dan lobi politik. Bentuk-bentuk komunikasi tersebut ada yang bersifat negatif dan positif, dan juga yang bersifat formal atau pun non-formal.

Widjaja (2010:12), membagi bentuk-bentuk komunikasi politik ke dalam tiga kelompok, yaitu:

a. Komunikasi personal

Komunikasi yang ditujukan kepada sasaran yang tunggal, bentuknya dapat berupa: anjang sono, tukar pikiran dan sebagainya. Komunikasi personal

efektifitasnya paling tinggi karena komunikasinya timbal balik dan terkonsentrasi.

b. Komunikasi kelompok

Komunikasi yang ditujukan kepada kelompok yang tertentu. Kelompok adalah suatu kumpulan manusia yang mempunyai antar hubungan sosial yang nyata dan memperlihatkan struktur yang nyata pula. Bentuk komunikasi ini adalah: ceramah, *briefing*, indoktrinasi, penyuluhan dan sebagainya.

c. Komunikasi massa

Komunikasi yang ditujukan kepada massa atau komunikasi yang menggunakan media massa. Massa disini adalah kumpulan orang-orang yang hubungan antar sosial tidak jelas dan tidak mempunyai struktur tertentu.

2.3 Komunikasi Massa

Komunikasi adalah suatu proses sosial yang sangat mendasar dan vital dalam kehidupan manusia. Tanpa komunikasi kehidupan manusia tidak akan bermakna, atau bahkan manusia tidak bisa bertahan hidup (Masmuh, 2013:3). Salah satu bentuk dari komunikasi adalah komunikasi massa. Menurut Effendy (2009:187) bahwa komunikasi massa merupakan proses komunikasi secara sekunder yaitu proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain dengan menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua (surat, telepon, teleks, surat kabar, majalah, radio, televisi dan lain-lain). Setelah memakai lambang sebagai media pertama.

Pada dasarnya komunikasi massa adalah komunikasi melalui media massa (media cetak dan elektronik) yang dihasilkan oleh teknologi modern sebagai saluran. Sebab, awal perkembangannya saja, komunikasi massa berasal dari pengembangan kata *media of mass communication* (Nurudin, 2007:4).

Komunikasi massa adalah komunikasi yang menggunakan media massa baik cetak atau elektronik, yang dikelola oleh suatu lembaga atau orang yang terlembagakan, yang ditujukan kepada sejumlah besar orang yang tersebar di banyak tempat, anonim dan heterogen (Mulyana, 2005:75). Pool dalam Wiryanto (2010:3) mendefinisikan komunikasi massa sebagai komunikasi yang berlangsung dalam situasi *interposed* ketika antara sumber dan penerima tidak terjadi kontak secara langsung, pesan-pesan komunikasi mengalir kepada penerima melalui saluran-saluran media massa, seperti surat kabar, majalah, radio, televisi atau film.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa komunikasi massa adalah komunikasi melalui media massa seperti surat kabar, majalah, buku, radio, televisi, dan lain-lain untuk menyampaikan informasi kepada khalayak.

Menurut Dominick dalam Ardianto dan Erdinaya (2007:15) fungsi komunikasi massa bagi masyarakat, adalah:

a. *Surveillance* (pengawasan)

- 1) Pengawasan peringatan (*warning or beware surveillance*)
- 2) Pengawasan instrumental (*instumental surveillance*)

b. *Interpretation* (penafsiran)

Media massa tidak hanya menyajikan fakta dan data, tetapi juga informasi beserta interpretasi mengenai suatu peristiwa tertentu.

c. *Linkage* (pertalian)

Media massa dapat menyatukan anggota masyarakat yang beragam, sehingga membentuk *linkage* (pertalian) berdasarkan kepentingan dan minat yang sama tentang sesuatu.

d. *Transmission of values* (penyebaran nilai-nilai)

Fungsi penyebaran nilai tidak kentara. Fungsi ini juga disebut *socialization* (sosialisasi).

e. *Entertainment* (hiburan)

Media massa seperti surat kabar dan majalah meskipun fungsi utamanya adalah informasi dalam bentuk pemberitaan, rubrik-rubrik hiburan selalu ada, apakah itu cerita pendek cerita panjang, atau cerita bergambar.

Oleh karena sifat komunikasi massa yang melibatkan banyak orang, maka proses komunikasinya sangat kompleks dan rumit. Menurut McQuail (2011:33) bahwa proses komunikasi massa terlihat berproses dalam bentuk:

- a. Melakukan distribusi dan penerimaan informasi dalam skala besar.
- b. Proses komunikasi massa juga dilakukan melalui satu arah, yaitu dari komunikator ke komunikan.
- c. Proses komunikasi massa berlangsung secara asimetris diantara komunikator dan komunikan.
- d. Proses komunikasi massa juga berlangsung impersonal dan tanpa nama.

- e. Proses komunikasi massa juga berlangsung berdasarkan pada hubungan-hubungan kebutuhan di masyarakat.

2.4 Terpaan Media

Terpaan media adalah keadaan terkena pada khalayak oleh pesan-pesan yang disebarkan oleh media massa (Effendy, 2009:124). Menurut Shore bahwa terpaan media tidak hanya menyangkut apakah seseorang secara fisik cukup dekat dengan kehadiran media massa, tetapi apakah seseorang itu benar-benar terbuka terhadap pesan-pesan media tersebut. Terpaan media merupakan kegiatan mendengarkan, melihat, dan membaca pesan media massa ataupun mempunyai pengalaman dan perhatian terhadap pesan tersebut, yang dapat terjadi pada tingkat individu ataupun kelompok (Ayuningtias, 2013).

Terpaan media adalah tingkat konsumsi khalayak terhadap program televisi yang diteliti dan dapat melihat melalui durasi yaitu berapa lama konsumsi yang dilakukan oleh pemirsa, frekuensi yaitu berapa kali pemirsa mengkonsumsi serta pengetahuan pemirsa akan isi dari program yang diteliti (McQuail, 2011:430). Menurut Rosengren dalam Kriyantono (2008:207) terpaan dapat dioperasionalkan menjadi jumlah waktu yang digunakan dalam berbagai jenis media, isi program yang dikonsumsi dan hubungan antara individu konsumen media dengan isi media yang dikonsumsi atau dengan media keseluruhan.

Menurut Rosengren dalam Rakhmat (2010:66) bahwa penggunaan media terdiri dari jumlah waktu yang digunakan dalam berbagai media, jenis isi media yang dikonsumsi, dan berbagai hubungan antara individu konsumen dengan isi media yang dikonsumsi atau dengan media secara keseluruhan. Terpaan media adalah banyaknya informasi yang diperoleh melalui media, yang meliputi frekuensi, atensi dan durasi penggunaan pada setiap jenis media yang digunakan (Rakhmat, 2010:66).

Berdasarkan berbagai pengertian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian terpaan media dalam penelitian ini adalah suatu keadaan dimana khalayak sasaran terkena pesan komunikasi yang terdapat dalam suatu media massa.

Teori *Media Exposure* yang disebut terpaan media berbicara mengenai khalayak dalam penggunaan media, baik jenis media, frekuensi penggunaan (*frequency*), maupun durasi penggunaan (*longevity*). Penggunaan jenis media meliputi media audio, audiovisual, media cetak, ataupun kombinasi beberapa media (Ardianto dan Erdiyana, 2007:168). Dalam teori terpaan media juga terdapat faktor yang sangat dibutuhkan yaitu perhatian (*attention*). Dengan demikian, peneliti dapat menyimpulkan untuk mengukur terpaan media adalah dengan melihat frekuensi, durasi dan intensitas seseorang dalam menyimak suatu rubrik di media cetak dalam bentuk majalah.

Media exposure akan ada apabila khalayak sungguh-sungguh membuka diri terhadap pesan yang diberikan media. Persepsi tentang hal ini juga relatif konsisten, yaitu kita cenderung memiliki citra yang stabil mengenai

gratifikasi yang diberikan media. Frank Biocca dalam Tubbs and Sylvia (2008:127) menetapkan lima elemen yang menjadi acuan dalam menggambarkan *media exposure* seseorang, yaitu:

- a. *Selectivity* (kemampuan memilih), yaitu kemampuan audiens dalam menetapkan pilihan terhadap media dan isi yang dieksposnya.
- b. *Utilitarianism* (pemanfaatan), yaitu kemampuan mendapatkan manfaat dari penggunaan media atau kemampuannya dalam mempertemukan kebutuhan dan tujuan-tujuan dengan penggunaan media.
- c. *Intentionality* (kesengajaan), yaitu tingkat kesengajaan audiens dalam menggunakan media atau kemampuannya dalam mengungkapkan tujuan-tujuan penggunaan media.
- d. *Involvement* (keterlibatan), yaitu tingkat keterlibatan audiens dalam menggunakan media seperti kemampuan mengikuti isi pesan yang disampaikan media, kemampuan melibatkan pikiran dan perasaan dengan pesan media, frekuensi dan juga intensitas keterlibatannya.
- e. *Impervious to Influence* (kemampuan melawan pengaruh media), yaitu kemampuan dalam mempertimbangkan setiap isi pesan, keterlibatan pemikiran dalam menilai setiap isi pesan yang disampaikan media.

Dalam diri seseorang kelima elemen di atas akan bervariasi menurut tingkatan yang berbeda. Berdasarkan perbedaan-perbedaan tersebut *media exposure* dapat dibedakan menjadi *media exposure* aktif dan pasif. Aktif apabila *media exposure* seseorang mencakup kelima elemen tersebut dan

tingkat kemampuannya relatif tinggi. Sebaliknya pasif apabila kemampuan pada tiap elemen mendekati nol (McQuail, 2011:333).

Sebagaimana dikemukakan oleh Rakhmat (2010:66) bahwa terpaan media adalah banyaknya informasi yang diperoleh melalui media, yang meliputi frekuensi, atensi dan durasi penggunaan pada setiap jenis media yang digunakan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini yang dijadikan indikator terpaan media dengan melihat frekuensi, durasi dan perhatian membaca seseorang. Dalam penelitian ini terpaan media yang dimaksud adalah terpaan pesan dari pemberitaan korupsi e-KTP di televisi terhadap persepsi mahasiswa tentang Partai Golkar. Hal ini dilakukan dengan cara mengukur frekuensi, durasi, dan perhatian mahasiswa dalam menerima pemberitaan tersebut.

2.5 Korupsi

2.5.1 Pengertian Korupsi

Terdapat banyak sekali pengertian tentang korupsi. Dalam arti luas, korupsi berarti menggunakan jabatan untuk keuntungan pribadi. Jabatan adalah kedudukan kepercayaan. Seseorang diberi wewenang atau kekuasaan untuk bertindak atas nama lembaga. Lembaga itu bisa lembaga swasta, lembaga pemerintah atau lembaga nirlaba. Korupsi berarti memungut uang dari layanan yang sudah seharusnya diberikan, atau menggunakan wewenang untuk mencapai tujuan yang tidak sah. Korupsi adalah tidak melaksanakan tugas karena lalai atau sengaja. Korupsi bisa mencakup yang sah dan tidak

sah. Korupsi dapat terjadi dalam tubuh organisasi (misalnya penggelapan uang) atau di luar organisasi (misalnya pemerasan). Korupsi kadang-kadang dapat membawa dampak positif di bidang sosial, namun pada umumnya korupsi menimbulkan inefisiensi, ketidakadilan dan ketimpangan (Klitgaard, *et.al*, 2002:2-3).

Korupsi pada hakekatnya merupakan penyalahgunaan kepercayaan untuk kepentingan pribadi. Menurut Soewartojo (2005:13), korupsi merupakan tingkah laku atau tindakan seseorang atau lebih yang melanggar norma-norma yang berlaku dengan menggunakan dan atau menyalahgunakan kekuasaan atau kesempatan melalui proses pengadaan, penetapan pungutan penerima atau pemberian fasilitas atau jasa lainnya yang dilakukan pada kegiatan penerimaan dan atau pengeluaran uang atau kekayaan, penyimpangan uang atau kekayaan serta dalam perizinan dan atau jasa lainnya dengan tujuan keuntungan pribadi atau golongannya sehingga langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan dan atau keuangan atau kekayaan negara atau masyarakat.

Sedangkan menurut Kartono (2014:90), korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeruk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara. Jadi korupsi merupakan gejala salah urus dari kekuasaan, demi keuntungan pribadi. Salah urus terhadap sumber-sumber kekayaan negara dengan menggunakan wewenang dan kekuatan-kekuatan formal (misalnya dengan alasan hukum dan kekuatan senjata) untuk memperkaya diri sendiri.

Korupsi bisa dimasukkan ke dalam kategori perbuatan kejahatan atau kriminal. Maka praktek-praktek yang dimasukkan dalam perbuatan korup antara lain adalah: Penggelapan, penyogokan, penyuapan, kecerobohan administrasi dengan intensi mencuri kekayaan negara, pemerasan, penggunaan kekuatan hukum dan atau kekuatan bersenjata untuk imbalan dan upah materiil, barter kekuasaan politik dengan sejumlah uang, penekanan kontrak-kontrak oleh kawan “sepermainan” untuk mendapatkan komisi besar bagi diri sendiri dan kelompok dalam, penjualan “pengampunan” pada oknum-oknum yang melakukan tindak pidana agar tidak dituntut oleh yang berwajib dengan imbalan uang suap, eksploitasi dan pemerasan formal oleh pegawai dan pejabat resmi, dan lain-lain (Kartono, 2014:135-136).

2.5.2 Ciri-ciri Korupsi

Menurut Shed Husein Alatas dalam Hartanti (2007:10-11) bahwa ciri-ciri korupsi adalah sebagai berikut:

- a. Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang. Hal ini tidak sama dengan kasus pencurian atau penipuan. Seorang operator yang korup sesungguhnya tidak ada dan kasus itu biasanya termasuk dalam pengertian penggelapan (*fraud*).
- b. Korupsi pada umumnya dilakukan secara rahasia, kecuali korupsi itu telah merajalela dan begitu dalam sehingga individu yang berkuasa dan mereka yang berada di dalam lingkungannya tidak tergoda untuk menyembunyikan perbuatannya. Namun, walaupun demikian motif korupsi tetap dijaga kerahasiaannya.

- c. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik. Kewajiban dan keuntungan itu tidak selalu berupa uang.
- d. Mereka yang mempraktekkan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlindung di balik pembenaran hukum.
- e. Mereka yang terlibat korupsi menginginkan keputusan yang tegas dan mampu untuk mempengaruhi keputusan-keputusan itu.
- f. Setiap perbuatan korupsi mengandung penipuan, biasanya dilakukan oleh badan publik atau umum (masyarakat).
- g. Setiap bentuk korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan.

2.5.3 Tipologi Korupsi

Menurut Vito Tanzi dalam Chaerudin dkk (2008:2) bahwa tipologi korupsi adalah sebagai berikut:

- a. Korupsi transaksi, yaitu korupsi yang terjadi atas kesepakatan di antara seorang donor dengan resipien untuk keuntungan kedua belah pihak.
- b. Korupsi ekstortif, yaitu korupsi yang melibatkan penekanan pemaksaan untuk menghindari bahaya bagi mereka yang terlibat atau orang-orang yang dekat dengan pelaku korupsi.
- c. Korupsi investif, yaitu korupsi yang berawal dari tawaran yang merupakan investasi untuk mengatisipasi adanya keuntungan di masa datang.
- d. Korupsi nepotistik, yaitu korupsi yang terjadi karena perlakuan khusus baik dalam pengangkatan kantor publik maupun pemberian proyek-proyek bagi keluarga dekat.

- e. Korupsi otogenik, yaitu korupsi yang terjadi ketika seorang pejabat mendapat keuntungan karena memiliki pengetahuan sebagai orang dalam (*insiders information*) tentang berbagai kebijakan publik yang seharusnya dirahasiakan.
- f. Korupsi supportif, yaitu perlindungan atau penguatan korupsi yang menjadi intrik kekuasaan dan bahkan kekerasan.
- g. Korupsi defensif, yaitu korupsi yang dilakukan dalam rangka mempertahankan diri dari pemerasaan.

2.6 Persepsi

2.6.1 Pengertian Persepsi

Persepsi merupakan pengalaman tentang objek, atau hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Jalaludin Rachmat juga menambahkan bahwa persepsi memberikan makna pada stimulus indrawi (*sensory stimulus*) (Rachmat, 2013:51). Sobur (2011:445) mengartikan persepsi sebagai proses ketika kita menjadi sadar atas banyaknya stimulus yang mempengaruhi indera kita. Persepsi dalam arti sempit ialah penglihatan, bagaimana cara seseorang melihat sesuatu: sedangkan dalam arti luas adalah pandangan atau pengertian, yaitu bagaimana seseorang memandang atau mengartikan sesuatu.

Walgito (2010:70) mengungkapkan bahwa persepsi merupakan suatu proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus yang diterima oleh organisme atau individu sehingga menjadi sesuatu yang berarti, dan

merupakan aktivitas yang *integrated* dalam diri individu. Respon sebagai akibat dari persepsi dapat diambil oleh individu dengan berbagai macam bentuk. Stimulus mana yang akan mendapatkan respon dari individu tergantung pada perhatian individu yang bersangkutan. Berdasarkan hal tersebut, perasaan, kemampuan berfikir, pengalaman-pengalaman yang dimiliki individu tidak sama, maka dalam mempersepsi sesuatu stimulus, hasil persepsi mungkin akan berbeda antar individu satu dengan individu lain.

Menurut Mulyana (2012:189) persepsi mencakup proses kognitif psikologis dalam diri subyek yang mencerminkan sikap, kepercayaan, nilai, dan pengharapan yang digunakan subyek untuk memaknai objek persepsi. Dengan perkataan lain, persepsi bersifat pribadi dan subyektif. Menurut Atkinson dkk (2010:201) persepsi mempunyai arti proses dimana kita mengorganisasi dan menafsirkan pola stimulus dalam lingkungan. Adapun menurut Krech dalam Thoha (2011:142) bahwa persepsi adalah suatu proses kognitif yang komplek dan menghasilkan suatu gambar unik tentang kenyataan yang barangkali sangat berbeda dengan kenyataannya.

Berdasarkan berbagai pengertian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah cara seseorang memandang suatu stimulus dalam lingkungannya yang tertangkap oleh panca indera. Stimulus yang dimaksud dalam penelitian ini adalah terpaan berita korupsi e-KTP di televisi.

2.6.2 Pengertian Persepsi Tentang Partai Golkar

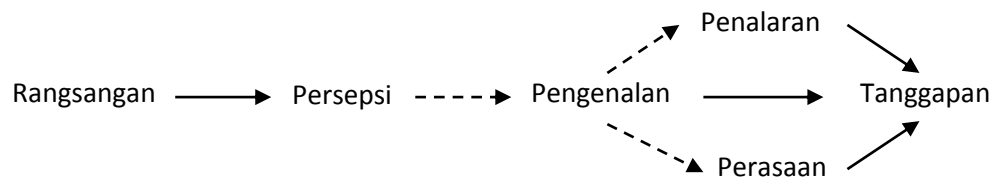
Berdasarkan pengertian persepsi dan partai politik (Partai Golkar), maka disimpulkan bahwa persepsi tentang Partai Golkar adalah pandangan mahasiswa terhadap Partai Golkar dimana ketua umum partai tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi e-KTP.

2.6.3 Proses Terjadinya Persepsi

Untuk lebih mempermudah dan memperjelas pemahaman tentang persepsi maka di bawah ini disarikan proses-proses terjadinya persepsi, dimana persepsi itu selalu diawali oleh adanya rangsangan (stimuli) serta diakhiri dengan respon. Menurut Walgito (2010:102), proses terjadinya persepsi sebagai berikut:

- a. Proses kealaman (fisik), yaitu objek menimbulkan stimulus, dan stimulus mengenal alat alat indera atau reseptor.
- b. Proses fisiologis, yaitu stimulus yang diterima oleh alat indera dilanjutkan oleh saraf sensoris ke otak.
- c. Proses psikologis, yaitu suatu proses di otak sehingga individu dapat menyadari apa yang ia terima dengan reseptor itu, sebagai suatu akibat dari stimulus yang diterimanya.
- d. Proses terakhir dari persepsi yaitu individu menyadari tentang apa yang diterima melalui alat indera atau reseptor yang kemudian mendapatkan respon dari individu melalui berbagai macam bentuk.

Secara sederhana proses dari pembentukan persepsi dapat digambarkan dalam gambar 1 berikut ini.



Gambar 1
Proses dari Pembentukan Persepsi (Atkinson dkk, 2010)

Atkinson dkk (2010) menjabarkan stimulus (rangsangan) sebagai energi fisik tertentu yang mengena pada satu reseptor yang peka terhadap energi semacam itu, situasi atau peristiwa yang dapat diberikan secara obyektif yang merupakan kejadian untuk respon organisme. Dengan adanya stimulus yang berupa suatu fenomena tertentu, maka akan dihasilkan suatu respon atau reaksi mengenai objek tersebut yang pada akhirnya akan membentuk suatu persepsi dari individu mengenai objek tersebut. Persepsi tidak hanya sekedar perekaman pasif dari stimulus mengenai alat indera, hal ini dikarenakan meskipun isi sensorik selalu ada dalam persepsi, namun apa yang dihayati akan terpengaruh oleh pengalaman yang telah terbentuk dan pengetahuan masa lalu. Apabila persepsi tidak akurat maka tidak mungkin bisa berkomunikasi dengan efektif. Oleh karena itu persepsilah yang menentukan untuk memilih suatu pesan dan mengabaikan pesan yang lain.

2.6.4 Jenis-jenis Persepsi

Persepsi dapat dibagi menjadi dua jenis. Menurut Irwanto (2002:71), dilihat dari segi individu setelah melakukan interaksi dengan objek yang dipersepsinya, maka hasil persepsi itu dapat dibagi dua jenis, yaitu:

a. Persepsi positif

Persepsi positif yaitu persepsi yang menggambarkan segala pengetahuan (tahu tidaknya atau dikenal tidaknya) dan tanggapan yang diteruskan kepada pemanfaatannya.

b. Persepsi negatif

Persepsi negatif yaitu persepsi yang menggambarkan segala pengetahuan (tahu tidaknya atau dikenal tidaknya) dan tanggapan yang tidak selaras dengan objek yang dipersepsi. Hal ini akan diteruskan dengan kapasitasnya atau menolak dan menentang segala usaha objek yang dipersepsinya.

Dapat dikatakan bahwa persepsi itu baik yang positif ataupun yang negatif akan selalu mempengaruhi diri seseorang dalam melakukan suatu tindakan. Munculnya suatu persepsi positif ataupun persepsi negatif semua itu tergantung pada bagaimana cara individu menggambarkan segala pengetahuannya tentang suatu obyek yang dipersepsi.

2.6.5 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Menurut Thoha (2011:154) bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang adalah sebagai berikut:

- a. Faktor internal: perasaan, sikap dan kepribadian individu, prasangka, keinginan atau harapan, perhatian (fokus), proses belajar, keadaan fisik, gangguan kejiwaan, nilai dan kebutuhan juga minat, dan motivasi.
- b. Faktor eksternal: latar belakang keluarga, informasi yang diperoleh, pengetahuan dan kebutuhan sekitar, intensitas, ukuran, keberlawanan,

pengulangan gerak, hal-hal baru dan familiar atau ketidak asingan suatu objek.

Adapun menurut Walgito (2010:70) bahwa faktor-faktor yang berperan dalam persepsi dapat dikemukakan beberapa faktor, yaitu:

a. Objek yang dipersepsi

Objek menimbulkan stimulus yang mengenai alat indera atau reseptor. Stimulus dapat datang dari luar individu yang mempersepsi, tetapi juga dapat datang dari dalam diri individu yang bersangkutan yang langsung mengenai syaraf penerima yang bekerja sebagai reseptor.

b. Alat indera, syaraf dan susunan syaraf

Alat indera atau reseptor merupakan alat untuk menerima stimulus, di samping itu juga harus ada syaraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus yang diterima reseptor ke pusat susunan syaraf, yaitu otak sebagai pusat kesadaran. Sebagai alat untuk mengadakan respon diperlukan motoris yang dapat membentuk persepsi seseorang.

c. Perhatian

Untuk menyadari atau dalam mengadakan persepsi diperlukan adanya perhatian, yaitu merupakan langkah utama sebagai suatu persiapan dalam rangka mengadakan persepsi. Perhatian merupakan pemusatan atau konsentrasi dari seluruh aktivitas individu yang ditujukan kepada sesuatu sekumpulan objek.

2.6.6 Tahap-tahap Persepsi

Menurut Pareek dalam Sobur (2011:451) bahwa tahap-tahap persepsi terdiri dari:

a. Proses menerima rangsangan atau stimulus

Fase ini terjadi apabila seseorang menghadapi stimulus atau rangsangan tertentu yang terjadi pada lingkungannya yang berupa peristiwa, hasil kerja suatu organisasi maupun orang-orang yang berada di sekelilingnya.

b. Proses menyeleksi rangsangan atau stimulus

Fase ini merupakan suatu proses dimana rangsangan atau stimulus harus disaring dan diseleksi terlebih dahulu untuk diproses lebih lanjut.

c. Proses pengorganisasian

Rangsangan yang diterima selanjutnya diorganisasikan dalam suatu bentuk yakni: pengelompokan, bentuk timbul dan latar, serta kemantapan.

d. Proses penafsiran

Setelah rangsangan diorganisasikan kemudian menafsirkan data itu berbagai cara. Dikatakan bahwa telah terjadi persepsi setelah data itu ditafsirkan.

e. Proses pengecekan

Sesudah data diterima dan ditafsirkan, si penerima mengambil beberapa tindakan untuk mengecek apakah tindakan itu salah atau benar.

f. Proses reaksi

Reaksi adalah tindakan yang dilakukan seseorang sesuai dengan informasi yang telah diserap. Reaksi ini dapat berupa sikap, pendapat, atau aktifitas nyata.

2.7 Partai Politik

2.7.1 Pengertian Partai Politik

Keberadaan partai politik dalam kehidupan ketatanegaraan pertama kali dijumpai di Eropa Barat, yakni sejak adanya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang patut diperhitungkan serta diikutsertakan dalam proses politik. Adanya gagasan untuk melibatkan rakyat dalam proses politik (kehidupan dan aktivitas ketatanegaraan), maka secara spontan Partai politik berkembang menjadi penghubung antara rakyat di satu pihak dan pemerintah di pihak lain (Budiardjo, 2008:159).

Oleh karena itu dapat ditarik pengertian bahwa sebagai organisasi yang secara khusus dipakai sebagai penghubung antara rakyat dengan pemerintah, keberadaan partai politik sejalan dengan munculnya pemikiran mengenai paham demokrasi dan kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan sistem ketatanegaraan.

Telah banyak pengertian yang dikemukakan oleh para sarjana mengenai partai politik. Pengertian-pengertian tersebut terangkum sebagai berikut (Budiardjo, 2008:160-161):

- a. Carl J. Friedrich: Sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pemimpin partainya, dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat ideal maupun materiil.
- b. R.H. Soltou: Sekelompok warganegara yang sedikit banyak terorganisir, yang bertindak sebagai satu kesatuan politik, yang dengan memanfaatkan kekuasaan memilih, bertujuan menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka.
- c. Sigmund Neumann: Organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan melawan golongan atau golongan-golongan lain yang tidak sepaham.
- d. Miriam Budiardjo: Suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama dengan tujuan memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya), dengan cara konstitusional guna melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka.

Berdasarkan pengertian- pengertian tersebut di atas, terlihat adanya “benang merah” yang menghubungkan masing-masing pendapat yang satu dengan yang lain, yaitu bahwa tujuan partai politik itu didirikan adalah untuk merebut ataupun mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan guna melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah digariskan oleh

masing-masing partai politik. Untuk merebut dan mempertahankan penguasaannya di dalam pemerintahan tentunya dilakukan secara konstitusional. Hal ini berarti keberadaan partai politik juga dimaksudkan sebagai sarana untuk meredam konflik kepentingan ataupun persaingan yang muncul di lingkungan masyarakat dalam mempengaruhi pemerintahan.

Oleh sebab itu, tidak ada salahnya jika keberadaan partai politik di negara modern dipergunakan untuk mewujudkan tatanan kehidupan kenegaraan yang lebih beradab. Hal ini mengingat sebelum dikenal adanya paham mengikutsertakan rakyat dalam sistem politik, perebutan kekuasaan selalu dilakukan dengan cara kekerasan. “Kasus Ken Arok” dalam sejarah Indonesia merupakan salah satu contohnya.

Berdasarkan konsep di atas maka dapat disimpulkan bahwa partai politik adalah suatu kelompok manusia yang terorganisir secara teratur baik dalam hal pandangan, tujuan maupun tata cara rekrutmen keanggotaan, dengan tujuan pokok yakni menguasai, merebut ataupun mempertahankan kekuasaannya dalam pemerintahan secara konstitusional.

2.7.2 Tujuan Partai Politik

Setiap organisasi yang dibentuk oleh manusia tentunya memiliki tujuan-tujuan tertentu. Demikian pula organisasi yang disebut partai politik. Tujuan pembentukan suatu partai politik, di samping yang utama adalah merebut, mempertahankan ataupun menguasai kekuasaan dalam pemerintahan suatu negara, juga dapat diperlihatkan dari aktivitas yang dilakukan. Sehubungan dengan hal tersebut, Kantaprawira (2010:62)

mengemukakan bahwa aktivitas yang dilakukan oleh partai politik pada umumnya mengandung tujuan:

- a. Berpartisipasi dalam sektor pemerintahan, dalam arti mendudukkan orang-orangnya menjadi pejabat pemerintah sehingga dapat turut serta mengambil atau menentukan keputusan politik atau output pada umumnya;
- b. Berusaha melakukan pengawasan, bahkan oposisi bila perlu terhadap kelakuan, tindakan, kebijaksanaan para pemegang otoritas (terutama dalam keadaan mayoritas pemerintahan tidak berada dalam tangan partai politik yang bersangkutan).
- c. Berperan untuk dapat memadu (*streamlining*) tuntutan-tuntutan yang masih mentah (*raw opinion*), sehingga partai politik bertindak sebagai penafsir kepentingan dengan mencanangkan isu-isu politik (*political issues*) yang dapat dicerna dan diterima oleh masyarakat secara luas.

Berdasarkan aktivitas dari partai politik tersebut di atas, maka rakyat sebagai subyek dalam sistem ketatanegaraan dapat melakukan pilihan-pilihan alternatif, yakni partai politik mana yang akan diikuti atau menjadi saluran politik mereka. Berkaitan dengan hal ini, di dalam struktur masyarakat yang masih paternalistik, maka pilihan rakyat untuk berafiliasi kepada suatu partai politik tertentu sangat ditentukan oleh ideologi atau aliran yang dianut oleh suatu partai politik. Oleh sebab itulah di dalam negara dengan struktur masyarakat yang masih paternalistik, partai politik gemar untuk memainkan ideologi-ideologi partai guna memperoleh dukungan massa atau rakyat, sehingga memperkuat posisi dalam kehidupan politik ketatanegaraan.

Penekanan mengenai program kehendak menjadi titik tolak utama untuk memperoleh dukungan massa rakyat. Kehidupan dan aktivitas partai politik semacam ini masih dapat dikategorikan sebagai partai politik tradisional.

2.7.3 Fungsi Partai Politik

Tidak dapat dipungkiri bahwa bergulirnya reformasi telah memberikan sumbangan yang besar bagi kehidupan politik nasional, terutama berkaitan dengan jaminan keberlangsungan proses demokratisasi. Dan tidak dapat dipungkiri pula bahwa reformasi telah melahirkan ratusan partai baru di Indonesia. Banyaknya jumlah partai merupakan asset politik yang tak temilai bagi suatu bangsa. Dengan banyaknya jumlah partai politik berarti akan banyak aspirasi politik dari masyarakat yang dapat diserap. Banyaknya jumlah partai politik juga akan menjamin berlangsungnya proses sosialisasi dan pendidikan politik. Dan yang tak kalah pentingnya, kondisi ini juga akan memungkinkan terciptanya sebuah perpolitikan nasional yang demokratis.

Namun sebaliknya, banyaknya jumlah partai politik juga dapat memunculkan konflik dan perpecahan dikalangan masyarakat, seperti yang terjadi pada masa demokrasi parlementer. Kondisi ini tentunya akan berakibat buruk pada proses demokratisasi. Untuk mencegah munculnya dampak negatif dari banyaknya jumlah partai disuatu negara, yang perlu dilakukan adalah memaksimalkan fungsi yang dimiliki oleh partai politik. Maksimalisasi fungsi partai politik merupakan syarat dasar dalam mengeliminir side effect dari banyaknya jumlah partai. Berkaitan dengan itu,

berdasarkan berbagai literatur ilmu politik, ada beberapa fungsi yang harus dimaksimalisasi dari sebuah partai politik (Budiardjo, 2008:163), yaitu:

Pertama, partai politik berfungsi sebagai sarana komunikasi politik. Dalam hal ini, partai politik merumuskan usulan-usulan kebijakan yang bertumpu pada aspirasi dari masyarakat. Kemudian rumusan tersebut diartikulasikan kepada pemerintah agar dapat dijadikan sebagai sebuah kebijakan. Proses ini menunjukkan bahwa komunikasi antar pemerintah dengan masyarakat dapat dijembatani oleh partai politik. Dan bagi partai politik mengartikulasikan aspirasi rakyat merupakan suatu kewajiban yang tidak dapat dielakkan, terutama bila partai politik tersebut ingin tetap eksis dalam kancah politik nasional.

Di lain pihak partai politik berfungsi untuk memperbincangkan dan menyebarluaskan rencana-rencana dan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah. Dengan demikian terjadi arus informasi serta dialog dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas, dimana partai politik memainkan peranan sebagai penghubung antar yang memerintah dan yang diperintah, antara pemerintah dan warga masyarakat. Dalam menjalankan fungsi ini partai politik sering disebut sebagai perantara dalam suatu ide-ide, kadang juga dikatakan bahwa partai politik bagi pemerintah bertindak sebagai alat pendengar, sedangkan bagi warga negara sebagai alat penguat suara.

Kedua, partai politik berfungsi sebagai sarana sosialisasi dan pendidikan politik. Dalam kaitan ini, partai politik berkewajiban untuk mensosialisasikan wacana politiknya kepada masyarakat. Wacana politik dari

sebuah partai politik dapat dilihat melalui visi, misi, *platform* dan program partai tersebut. Dengan sosialisasi wacana politik ini diharapkan masyarakat akan menjadi semakin dewasa dan terdidik dalam politik. Sosialisasi dan pendidikan politik ini memposisikan masyarakat sebagai subyek, tidak lagi sebagai obyek.

Di samping itu sosialisasi politik juga mencakup proses melalui mana masyarakat menyampaikan norma-norma dan nilai-nilai dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dalam hubungan ini, partai politik berfungsi sebagai salah satu sarana sosialisasi politik. Dalam usaha menguasai pemerintah melalui kemenangan dalam pemilu, partai harus memperoleh dukungan seluas mungkin. Untuk itu partai berusaha menciptakan *image* bahwa partai tersebut memperjuangkan kepentingan umum. Di samping menanamkan solidaritas dengan partai, partai politik juga mendidik anggotanya menjadi manusia yang sadar akan tanggungjawabnya sebagai warga negara dan menempatkan kepentingan sendiri di bawah kepentingan nasional.

Ketiga, partai politik, berfungsi sebagai sarana rekrutmen politik, dimana partai politik berkewajiban untuk melakukan seleksi dan rekrutmen dalam rangka mengisi posisi dan jabatan politik tertentu. Dengan adanya rekrutmen politik maka dimungkinkan terjadinya rotasi dan mobilitas politik. Tanpa rotasi dan mobilitas politik pada sebuah sistem politik, maka akan muncul diktatorisme dan stagnasi politik dalam sistem tersebut.

Keempat, partai politik berfungsi sebagai sarana peredam dan pengatur konflik. Dengan fungsinya sebagai penyerap aspirasi masyarakat,

maka partai politik harus peka dan tanggap terhadap potensi-potensi konflik yang ada dalam masyarakat. Dan karena partai politik cenderung inklusif, menjadi kewajiban partai politik untuk meredam dan mengatur potensi konflik tersebut agar tidak meledak.

Jika keempat fungsi ini berjalan dengan baik sebagaimana mestinya, maka kekhawatiran akan munculnya konflik dan perpecahan akibat banyaknya jumlah partai politik menjadi tidak beralasan. Begitu pula sebaliknya, hal ini akan menjadi “energi pendorong” bagi proses demokratisasi.

2.7.4 Klasifikasi Partai Politik

Banyak jenis dan bentuk partai politik yang hidup dan berkembang di dalam suatu kehidupan ketatanegaraan. Berkaitan dengan hal inilah, maka menurut Budiardjo (2008:166-167) bahwa pada hakikatnya klasifikasi partai politik dapat digambarkan sebagai berikut:

a. Klasifikasi partai politik ditinjau dari komposisi dan fungsi keanggotaannya

Klasifikasi semacam ini dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis partai politik, yaitu:

- 1) Partai Massa, yakni suatu partai politik yang lebih mengutamakan kekuatannya berdasarkan keunggulan jumlah anggota. Oleh karena itu biasanya terdiri dari pendukung-pendukung dari berbagai aliran politik dalam masyarakat yang sepakat di bawahnya dalam memperjuangkan suatu program yang biasanya luas dan agak kabur.

- 2) Partai Kader, yaitu suatu partai politik yang lebih mementingkan keketatan organisasi dan disiplin kerja dan anggota-anggotanya. Pemimpin partai biasanya menjaga kemurnian doktrin partai yang dianut dengan jalan mengadakan saringan calon-calon anggotanya secara ketat.

b. Klasifikasi partai politik ditinjau dari sifat dan orientasinya.

Partai politik dengan klasifikasi semacam ini dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis, yaitu:

- 1) Partai lindungan (*patronage party*), yaitu suatu partai politik yang pada umumnya memiliki organisasi nasional yang kendor (meskipun organisasi di tingkat lokal sering cukup ketat). Disiplin yang lemah dan biasanya tidak terlalu mementingkan pemungutan iuran secara teratur. Tujuan utama dari partai politik jenis ini adalah memenangkan Pemilihan Umum untuk anggota-anggota yang dicalonkannya. Oleh sebab itu partai semacam ini hanya giat melaksanakan aktivitasnya menjelang Pemilu. Contoh yang dapat dikemukakan di sini adalah Partai Demokrat dan Partai Republik di Amerika Serikat.
- 2) Partai ideologi (partai asas), yaitu suatu partai politik (biasanya) yang mempunyai pandangan hidup yang digariskan dalam kebijaksanaan pemimpin dan berpedoman pada disiplin partai yang kuat dan mengikat. Hampir sebagian besar partai-partai politik yang ada di Indonesia dapat dikategorikan sebagai partai ideologi.

Berdasarkan dua klasifikasi besar mengenai partai politik tersebut di atas (jika partai-partai politik itu akan melakukan koalisi) maka langkah yang paling mudah dan relatif berhasil untuk ditempuh adalah dengan melakukan koalisi partai politik yang sama-sama berjenis partai massa atau sama-sama partai lingkungan. Koalisi antar partai kader atau antar partai ideologi relatif sulit untuk dilakukan. Apalagi koalisi antar partai politik dengan ideologi yang jauh berseberangan. Misalnya koalisi antar partai yang berideologikan keagamaan tertentu.

2.7.5 Sistem Kepartaian

Dalam kehidupan politik ketatanegaraan suatu negara, pada prinsipnya dikenal adanya tiga sistem kepartaian (Budiardjo, 2008:166-167), yaitu:

- a. Sistem Partai Tunggal (*The Single Party System*). Istilah ini dipergunakan untuk partai politik yang benar-benar merupakan satu-satunya partai politik dalam suatu negara, maupun untuk partai politik yang mempunyai kedudukan dominan di antara beberapa partai politik lainnya. Namun demikian (oleh para sarjana) dianggap merupakan bentuk penyangkalan diri (*contradictio in terminis*), mengingat dalam pengertian sistem itu sendiri akan selalu mengandung lebih dari satu unsur atau komponen. Kecenderungan untuk mengambil sistem partai tunggal disebabkan, karena pimpinan negara-negara baru sering dihadapkan masalah bagaimana mengintegrasikan berbagai golongan, daerah, suku bangsa yang berbeda corak sosial dan pandangan hidupnya. Dikhawatirkan bahwa bila keanekaragaman sosial budaya ini dibiarkan tumbuh dan berkembang,

besar kemungkinan akan terjadi gejolak-gejolak sosial yang menghambat usaha-usaha pembangunan dan menimbulkan disintegrasi.

- b. Sistem Dua Partai (*Two Party Systems*). Menurut Maurice Duverger, sistem ini adalah khas Anglo Saxon (Amerika, Filipina). Dalam sistem ini partai-partai politik dengan jelas dibagi ke dalam partai politik yang berkuasa (karena menang dalam Pemilihan Umum) dan partai oposisi (karena kalah dalam Pemilihan Umum).
- c. Sistem Banyak Partai (*Multy Party System*). Pada umumnya sistem kepartaian semua ini muncul karena adanya keanekaragaman sosial budaya dan politik yang terdapat di dalam suatu negara.

2.8 Teori S-R (*Stimulus-Respons*)

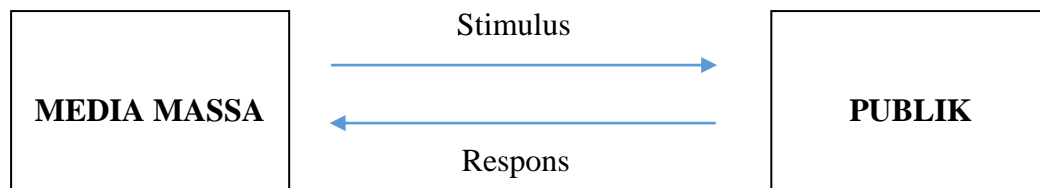
De Fleur dalam McQuail (2011:234-235) menerangkan tentang *The Mechanistic Stimulus-Respon (S-R) Theory* dimana behaviorisme sangat berpengaruh terhadap model ini. Model efek media massa tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Harus memperhitungkan reaksi individu, karena sekalipun reaksi yang diharapkan telah terlihat bukti reaksi itu berbeda-beda sesuai dengan perbedaan kepribadian, sikap kecerdasan, minat, dan sebagainya. De Fleur menulis pesan media mengandung atribut rangsangan tertentu yang memiliki interaksi yang berbeda-beda dengan karakteristik kepribadian anggota audiens.

2. Semakin jelas bahwa reaksi itu berbeda-beda secara sistematis sesuai dengan kategori sosial penerima yang antara lain berdasarkan usia, pekerjaan, gaya hidup, jenis kelamin, agama dan sebagainya.

Menurut teori ini efek yang ditimbulkan adalah reaksi khusus terhadap stimulus khusus, sehingga seseorang dapat mengharapkan dan memperkirakan kesesuaian antara pesan dan reaksi komunikan. Selain itu, teori ini menjelaskan tentang pengaruh yang terjadi pada pihak penerima sebagai akibat dari ilmu komunikasi (McQuail, 2011:234). Akibat atau pengaruh yang terjadi merupakan suatu reaksi tertentu dari rangsangan tertentu, artinya *stimulus* dan dalam bentuk apa pengaruh atau *stimulus* tersebut tergantung dari isi pesan yang ditampilkan (Sendjaja, 2009:71).

Singkatnya, menurut teori ini bahwa media massa amat perkasa dalam mempengaruhi penerimaan pesan. Teori SR menggambarkan proses komunikasi secara sederhana yang hanya melibatkan dua komponen, yaitu media massa dan penerima pesan yaitu khalayak. Media massa mengeluarkan stimulus dan penerima pesan menanggapi dengan menunjukkan respons sehingga dinamakan teori *Stimulus-Respons* (Morissan, 2010:17). Jika unsur *stimulus* berupa pesan, dan unsur *response* berupa efek maka sangat tepat jika peneliti menggunakan teori SR untuk dipakai sebagai pijakan teori dalam penelitian. Teori S-R dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1
Model Teori S-R (Morissan, 2010:17)

Menurut model pada gambar 2 menunjukkan bahwa stimulus atau pesan yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan berupa terpaan pemberitaan korupsi di media massa mungkin diterima atau mungkin saja terjadi penolakan. Dalam tahapan berikutnya bila komunikan menerima stimulus atau pesan yang disampaikan maka akan memperhatikan. Proses selanjutnya, komunikan tersebut mengerti pesan yang telah disampaikan, dan proses akhir adalah kesediaan dari komunikan untuk mengubah sikap yang menandakan keberhasilan dalam proses komunikasi (Effendy, 2009:256).

Keterkaitan model teori S-R dalam penelitian ini adalah: (a) *Stimulus* yang dimaksud adalah terpaan berita korupsi e-KTP di televisi; (b) *Response* yang dimaksud adalah persepsi mahasiswa tentang Partai Golkar (dimana ketua umum partai tersebut menjadi tersangka korupsi e-KTP) yang menerima terpaan berita korupsi e-KTP tersebut.

2.9 Hipotesis

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Ho : Terpaan berita korupsi e-KTP di televisi tidak berpengaruh signifikan terhadap persepsi mahasiswa tentang Partai Golkar.

Hi : Terpaan berita korupsi e-KTP di televisi berpengaruh signifikan terhadap persepsi mahasiswa tentang Partai Golkar.

